

Politik Transfer Fiskal dan Ketimpangan Kapasitas Daerah: Studi Komparatif Kabupaten Kaya Sumber Daya dan Kabupaten Bergantung Transfer

Aldi Taher¹

¹University of Banten; Email: alditaher@undip.ac.id

*Corresponding Author: alditaher@undip.ac.id

Citation: Aziz (2026). The Title of Article (Book Antiqua 14pt Bold). *Issues, Methods, and Advances in Engineering Research*, 10(4), xx–xx. <https://doi.org/0000-0000>

Published: 28/04/2026

ABSTRACT

This article examines how intergovernmental fiscal transfers shape local governance incentives in two contrasting types of Indonesian districts: resource-rich districts and transfer-dependent districts. Using a comparative secondary-data-based case study, this article analyzes fiscal decentralization, local revenue capacity, and institutional incentives in regional budgeting. The study argues that fiscal transfers do not merely finance local development; they also structure political incentives, administrative behavior, and accountability relations between central and local governments. Resource-rich districts may possess greater fiscal space but face risks of rent-seeking and weak expenditure discipline, while transfer-dependent districts often operate under narrower fiscal autonomy and stronger dependency on central allocation rules. The article's novelty lies in conceptualizing fiscal decentralization as an incentive regime rather than merely a budgetary arrangement. The article contributes to politics and governance studies by showing how fiscal design shapes local political behavior, elite strategies, and public service outcomes. The findings suggest that fiscal reform should focus not only on allocation formulas but also on institutional incentives, transparency, and performance-based accountability.

Keywords: fiscal decentralization; intergovernmental transfer; local governance; political incentives; Indonesia

INTRODUCTION

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar utama reformasi tata kelola Indonesia. Transfer ke Daerah dirancang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan pengurangan ketimpangan antardaerah. Dokumen kebijakan Transfer ke Daerah tahun anggaran 2024 menekankan bahwa kebijakan TKD diarahkan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah (Kementerian Keuangan, 2024).

Namun, desain transfer fiskal tidak netral secara politik. Ia membentuk insentif bagi kepala daerah, birokrasi, DPRD, dan kelompok kepentingan lokal. Daerah kaya sumber daya memiliki kapasitas fiskal lebih besar melalui dana bagi hasil dan pendapatan terkait aktivitas ekonomi ekstraktif. Sebaliknya, daerah yang bergantung pada Dana Alokasi Umum dan transfer pusat memiliki ruang kebijakan lebih sempit. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah kapasitas fiskal lebih besar selalu menghasilkan tata kelola lebih baik?

Literatur desentralisasi fiskal memberikan jawaban yang tidak tunggal. Oates (1972) berargumen bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi karena pemerintah lokal lebih memahami preferensi warga. Namun, Bardhan (2002) memperingatkan bahwa desentralisasi dapat memperkuat elite capture jika institusi lokal lemah. Faguet (2014) menunjukkan bahwa dampak desentralisasi bergantung pada struktur insentif

politik lokal. Sementara itu, literatur political budget cycles menunjukkan bahwa anggaran lokal sering digunakan untuk membangun dukungan politik elektoral, bukan selalu untuk meningkatkan kualitas layanan (Keefer & Khemani, 2005).

Research gap artikel ini terletak pada kurangnya analisis yang memperlakukan transfer fiskal sebagai rezim insentif politik. Banyak kajian fiskal lokal berfokus pada rasio belanja, kapasitas pendapatan asli daerah, atau ketergantungan transfer, tetapi belum cukup menjelaskan bagaimana desain fiskal membentuk perilaku aktor politik lokal. Gap empirisnya terletak pada kebutuhan membandingkan kabupaten kaya sumber daya dan kabupaten bergantung transfer sebagai dua tipe rezim fiskal yang menghasilkan logika politik berbeda.

Novelty artikel ini adalah model Fiscal Design → Institutional Incentives → Elite Strategy → Budget Outcome → Service Performance. Artikel ini berkontribusi dengan menjelaskan bahwa problem tata kelola fiskal bukan semata kekurangan dana, melainkan relasi antara desain transfer, insentif elite, dan akuntabilitas belanja. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana perbedaan struktur fiskal memengaruhi perilaku politik anggaran dan outcome tata kelola lokal.

METHODOLOGY

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus komparatif. Dua tipe kasus yang dibandingkan adalah kabupaten kaya sumber daya dan kabupaten bergantung transfer pusat. Pemilihan kasus didasarkan pada perbedaan struktur fiskal: kasus pertama memiliki ruang fiskal lebih luas karena pendapatan sumber daya, sedangkan kasus kedua memiliki ketergantungan tinggi pada transfer pusat. Unit analisis adalah rezim insentif fiskal dalam proses perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas daerah.

Data berasal dari dokumen Transfer ke Daerah, laporan Kementerian Keuangan, literatur desentralisasi fiskal, kajian World Bank, serta dokumen kebijakan anggaran daerah yang tersedia secara publik. Karena tidak menggunakan wawancara, artikel ini tidak menyertakan kutipan informan. Analisis dilakukan dengan membandingkan empat variabel: kapasitas fiskal, insentif elite, disiplin belanja, dan kinerja layanan. Validasi dilakukan melalui triangulasi antara literatur akademik, dokumen fiskal, dan laporan lembaga kredibel.

RESULTS & DISCUSSION

1. Kapasitas fiskal dan ilusi otonomi anggaran

Kabupaten kaya sumber daya memiliki ruang fiskal yang lebih besar, tetapi ruang tersebut tidak otomatis menghasilkan kualitas layanan yang lebih baik. Dalam banyak kasus, kapasitas fiskal tinggi dapat memperluas belanja infrastruktur dan program lokal, tetapi juga membuka ruang pemborosan, proyek patronase, dan ketergantungan pada sumber pendapatan yang fluktuatif. Sebaliknya, kabupaten bergantung transfer sering menghadapi keterbatasan fiskal, tetapi aturan transfer pusat dapat mendorong disiplin administratif tertentu.

Temuan ini menunjukkan bahwa otonomi fiskal bukan hanya soal jumlah uang, tetapi juga kualitas insentif. Jika akuntabilitas lemah, ruang fiskal besar dapat memperbesar rente. Jika ruang fiskal sempit tetapi aturan kinerja jelas, daerah dapat mendorong mengalokasikan belanja lebih selektif. Dengan demikian, teori desentralisasi perlu memperhitungkan fiscal incentive structure.

2. Elite lokal dan strategi politik anggaran

Anggaran daerah adalah arena politik. Kepala daerah membutuhkan dukungan DPRD, birokrasi, kontraktor, dan pemilih. Dalam kabupaten kaya sumber daya, strategi elite sering berorientasi pada distribusi proyek dan kontrol atas belanja modal. Dalam kabupaten bergantung transfer, strategi elite lebih banyak diarahkan pada akses program pusat, kepatuhan administratif, dan negosiasi alokasi.

Kondisi ini mendukung argumen Bardhan bahwa desentralisasi dapat memperkuat kelompok elite lokal apabila tidak disertai pengawasan efektif (Bardhan, 2002). Namun, temuan ini juga memperluas literatur

tersebut dengan menunjukkan bahwa bentuk elite capture dipengaruhi oleh struktur fiskal. Elite capture di daerah kaya sumber daya cenderung berbasis rente proyek, sementara di daerah bergantung transfer cenderung berbasis kontrol atas akses program.

3. Ketimpangan kapasitas dan outcome pelayanan

Perbedaan struktur fiskal menghasilkan variasi outcome pelayanan. Daerah kaya sumber daya dapat membangun infrastruktur lebih cepat, tetapi keberlanjutan layanan bergantung pada kualitas perencanaan dan belanja operasi. Daerah bergantung transfer mungkin lebih lambat membangun infrastruktur, tetapi dapat meningkatkan layanan jika mampu menyelaraskan program pusat dengan kebutuhan lokal.

Studi ini menunjukkan bahwa reformasi fiskal perlu bergerak dari pendekatan alokasi menuju pendekatan insentif. Formula transfer harus dikaitkan dengan kinerja, transparansi, dan penguatan kapasitas lokal. Tanpa itu, transfer fiskal berisiko menjadi mekanisme distribusi administratif tanpa transformasi governance.

Tabel 1. Tabel bukti analitis politik transfer fiskal

Variabel	Temuan Empiris	Bukti Data/Kutipan	Interpretasi Analitis
Kapasitas fiskal	Kabupaten kaya sumber daya memiliki ruang belanja lebih besar	Kebijakan TKD 2024 diarahkan untuk kualitas desentralisasi dan kinerja daerah (Kementerian Keuangan, 2024)	Ruang fiskal besar membutuhkan akuntabilitas kuat
Ketergantungan transfer	Kabupaten bergantung transfer memiliki otonomi fiskal terbatas	TKD tetap menjadi instrumen utama pembiayaan daerah (Kementerian Keuangan, 2024)	Ketergantungan fiskal membentuk kepatuhan administratif
Strategi elite	Elite menyesuaikan strategi dengan struktur fiskal	Literatur elite capture dan desentralisasi (Bardhan, 2002; Faguet, 2014)	Desain fiskal membentuk perilaku politik lokal

Sumber: diolah dari Kementerian Keuangan (2024), Bardhan (2002), Faguet (2014), Oates (1972), dan World Bank (2023).

4. Proposisi teoretis

Proposisi 1: Kapasitas fiskal yang tinggi meningkatkan peluang inovasi daerah hanya jika disertai akuntabilitas belanja.

Proposisi 2: Ketergantungan transfer membatasi otonomi kebijakan, tetapi dapat memperkuat disiplin administratif jika indikator kinerja jelas.

Proposisi 3: Desain fiskal membentuk strategi elite lokal melalui struktur insentif yang melekat pada sumber pendapatan dan aturan belanja.

CONCLUSION

Artikel ini menunjukkan bahwa transfer fiskal adalah instrumen politik kelembagaan, bukan sekadar mekanisme teknis anggaran. Perbandingan antara kabupaten kaya sumber daya dan kabupaten bergantung transfer memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal tinggi tidak otomatis menghasilkan tata kelola lebih baik. Sebaliknya, outcome kebijakan ditentukan oleh struktur insentif, kualitas akuntabilitas, dan strategi elite lokal.

Kontribusi teoretis artikel ini adalah konseptualisasi transfer fiskal sebagai rezim insentif. Secara praktis, reformasi Transfer ke Daerah perlu menekankan kinerja, transparansi, dan penguatan kapasitas lokal. Secara kebijakan, pemerintah pusat perlu mengembangkan formula yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan fiskal, tetapi juga kualitas belanja dan akuntabilitas daerah. Secara politik, pengawasan DPRD, masyarakat sipil, dan audit publik perlu diperkuat agar fiskal daerah tidak menjadi arena patronase.

REFERENCES

- Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. Journal of Economic Perspectives, 16(4), 185–205.*
- Faguet, J. P. (2014). Decentralization and governance. World Development, 53, 2–13.*
- Keefer, P., & Khemani, S. (2005). Democracy, public expenditures, and the poor. World Bank Research Observer, 20(1), 1–27.*
- Kementerian Keuangan. (2024). Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024.*
- Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. Harcourt Brace.*
- Rodden, J. (2006). Hamilton's paradox. Cambridge University Press.*
- Tiebout, C. (1956). A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy, 64(5), 416–424.*
- World Bank. (2023). Indonesia public finance review.*